

Di tempat yang sama, wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Demokrat tidak dalam posisi mendukung dua usulan mekanisme Pilkada, baik langsung atau melalui DPRD. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengusulkan jalan tengah untuk mempertemukan dua usulan yang berbeda, jalan tengah itu adalah pemilihan langsung untuk bupati/wali kota, sementara gubernur dipilih oleh DPRD.

Ia berharap perbedaan pandangan itu dapat disepakati melalui musyawarah mufakat. Pengambilan suara (voting) dilakukan sebagai langkah terakhir.

Wakil ketua DPRD dari fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, proses komunikasi dengan partai di DPR terkait RUU Pilkada terus intensif dilakukan. " Saya mengakini tanggal 25 September harapan rakyat terhadap kedaulatan yang mereka miliki akan tetap bisa digunakan di pilkada," katanya.

Dengan posisi Partai Demokrat memilih pilkada langsung, peta dukungan di DPR memang berubah. Jika semua konsisten, pilkada langsung didukung 287 suara, sementara pilkada pilkada oleh DPRD didukung 273 suara. Karena hitung ini. Anggota pansus RUU Pilkada dari fraksi PKB Abdul Malik Haramain, yakin pilkada langsung akan menang jika voting dilakukan soal pilkada langsung atau oleh DPRD.

Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, mengatakan, perbedaan RUU Pilkada terletak pada pilkada langsung atau oleh DPRD." Ya itu memang kemungkinan akan di voting," ujarnya.

Diferensiasi : *Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis.*” *Upaya itu nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan,” katanya.*

Dalam kalimat Indiferensiasi jelas dikatakan bahwa sekelompok Elite yang mencoba merebut kedaulatan dari tangan Rakyat dan seringkali menyalah gunakan kekuasaan. Lalu di dalam kalimat yang kedua yaitu kalimat Diferensiasi menjelaskan bahwa Megawati dan umumnya PDI-P mengajak untuk menanggapi secara kritis tentang perubahan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.

Teks ini memarjinalkan posisi Kelompok Elite dengan menampilkan seakan kaum elite itu haus kekuasaan dengan merebut kedaulatan dari tangan rakyat lalu kaum Elite juga digambarkan sering menyalahgunakan kekuasaan dengan cara korupsi dan melanggengkan nepotisme.

Disisi lain ditampilkan juga Megawati sebagai ketua Umum PDI-P sangat memikirkan nasib rakyat dengan cara menanggapi dan memberi respon secara kritis mengenai polemic tersebut. Hal ini menunjukkan seolah-olah PDI-P peduli terhadap masalah rakyat. Teks tersebut sangat memarjinalkan Kaum Elite karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi yang pertama (Kaum Elite yang menyalahgunakan kekuasaan dan mencoba merebut kedaulatan dari tangan Rakyat) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (Megawati yang mengajak menanggapi dengan kritis polemic ini). Fakta seperti kenapa mereka (kaum Elite) menyalahgunakan kekuasaan dan mencoba mengubah pilkada langsung ke DPRD tidak ditampilkan.

Strategi wacana seperti ini juga ada lagi yaitu terdapat pada paragraf ke 5 yaitu:

Pilkada langsung karena berdasarkan amanat reformasi. Kalimat yang kedua ini secara tidak langsung membedakan antara sikap PDI-P dengan sikap atau kepemimpinan pada masa Orde Baru yang dikuasai oleh segelintir Elite dan yang sarat akan nepotisme. Dan ini mengandung konstruksi pencitraan karena PDI-P sekarang beralih menjadi partai pemerintahan.

Ada unsur memarjinalkan posisi kaum elite jika kita telaah lebih dalam, yaitu dengan cara membandingkan masa Orde Baru berkuasa yang mana ketika itu Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) yang berasal dari partai yang berkuasa, hal ini menunjukkan bahwa kaum elite suka memonopoli kekuasaan. Dan disisi lain ditampilkan sosok Megawati sebagai ketua umum PDI-P sangat mendukung dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan amanat reformasi. Dan ini mengindikasikan bahwa partai moncong putih menghormati kedaulatan dan hak politik Rakyat sepenuhnya.

Dikatakan memarjinalkan karena teks tersebut memisahkan sedemikian rupa, proposisi yang pertama (ciri dari kepemimpinan pada masa Orde Baru yang suka melanggengkan kekuasaan dengan pemilihan pemimpin oleh segelintir Elite) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua(Megawati sangat mendukung pemilihan Umum secara langsung karena itu merupakan amanat dari reformasi dan merupakan wujud dari demokrasi dan hak politik rakyat. Dan ada yang aneh fakta mengapa masa kepemimpinan Orde Baru bisa begitu dan apa yang diinginkan oleh Megawati selaku ketua umum PDI-P tidak ditampilkan dalam wacana tersebut.

2. Objektivasi- Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai sesuatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkrit, ataukah ditampilkan

gunakan untuk menggambarkan kaum Elite itu sangat berambisi untuk mengubah pemilu melalui DPRD.

3. Nominasi- Kategorisasi

Dalam suatu pemberitaan mengenai actor(seseorang/ kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah actor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari actor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori ini sebenarnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Strategi wacana seperti ini terdapat pada paragraf ke 10 yaitu :

“Megawati menambahkan, atas dasar amanat reformasi, pemilu dilaksanakan langsung. Pemilu langsung merupakan anti thesis kepemimpinan Orde Baru yang represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilihan oleh segelintir elite. Pemilu langsung menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat yang mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat.”

Nominasi : *Pemilu langsung merupakan anti thesis kepemimpinan Orde Baru.*

Kategorisasi : *Pemilu langsung merupakan anti thesis kepemimpinan Orde Baru yang represif dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilihan oleh segelintir elite.*

Kedua kalimat tersebut artinya sama yakni sama-sama menjelaskan bahwa pemilu langsung itu merupakan anti-thesis dari kepemimpinan Orde Baru. Pemberian kategori yang represif dan melanggengkan kekuasaan itu secara tidak langsung berita tersebut mengasosiasikan ke dalam benak khalayak atau masyarakat bahwa kepemimpinan Orde Baru itu identik dengan

Soekarnoputri, program yang telah dipaparkan presiden terpilih Jokowi, dan pandangan umum DPD-DPD yang disampaikan Ketua DPD Jawa Tengah Heru Sudjarmoko.

Terkait sikap politik menurut Puan, Rakernas IV PDI-P mendukung visi dan misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) 2014-2019. Pemerintah Jokowi- JK diharapkan secepatnya mengatasi masalah krisis pangan dan energi yang mengancam kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Puan, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang selama ini lebih menguntungkan pihak lain.

Sebelumnya, permasalahan kedaulatan pangan menjadi pembahasan dinamis di siding Komisi I Rakernas, yang juga diikuti 28 kader PDI-P yang menjadi Kepala Daerah. Beberapa Kepala Daerah siap menyediakan ribuan hektar lahan padi, tebu, serta komoditas pertanian lain. Selain soal lahan, pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan dan sarana irigasi juga dibahas.

Pemerintah baru juga diharapkan mengatasi krisis ekonomi dan energi yang berpotensi terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas, serta pembekakan deficit transaksi berjalan, melemahnya nilai rupiah, utang luar negeri yang besar, dan ketergantungan terhadap produk pangan impor. Dalam catatan Kompas, Jokowi berniat mengurangi subsidi BBM secara bertahap.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies Erwin Usman, dalam diskusi Migas untuk Rakyat”, Minggu (21/9), mengatakan , persoalan kedaulatan energi dan gangguan dari mafia migas di sektor hulu dan hilir itu tidak mengada-ada.

membedakan antara sikap pemerintahan yang lama dalam hal ini sebelum Jokowi – JK dengan Pemerintahan yang baru yaitu era Jokowi- JK.

Teks ini secara tidak langsung memarjinalkan posisi pemerintahan sebelum era Presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu rezim SBY dalam hal mengatur politik pertanian dan energi yang selama ini menguntungkan pihak lain, selain dari pada itu, ada juga pihak yang disudutkan yaitu Mafia Migas. Hal ini ditunjukkan dengan menampilkan seolah pemerintahan sebelumnya (eraPresiden Susilo Bambang yudhoyono) dianggap tidak piawai dalam mengatur politik pertanian dan energi, malah semakin parah menguntungkan suatu pihak yang dalam hal ini adalah Mafia Migas. Dan disisi lain ditampilkan bahwa Pemerintahan Jokowi – JK dengan Partai pengusungnya yaitu PDI-P akan melakukan sebuah perombakan total dibidang politik pangan dan energi. Dengan cara menata ulang kebijakan politik pertanian dan energi agar tidak golongan tertentu saja yang menikmati dan diuntungkan.

Dikatakan memarjinalkan karena didalam teks berita tersebut memisahkan sedemikian rupa yaitu antara kalimat yang pertama yaitu kalimat indiferensiasi (yang pada intinya adalah adanya politik pangan dan energi sebelum pemerintahan Jokowi – JK lebih menguntungkan suatu pihak) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi kedua (yaitu pemerintahan yang baru berkomitmen untuk mendaur ulang kebijakan politik pangan dan energi). Dan yang sangat ironis adalah fakta seperti mengapa Pemerintahan sebelum era Jokowi – JK melakukan kebijakan Politik energi dan pangan yang lebih menguntungkan suatu pihak tidak di jelaskan di dalam teks.

2. Objektivasi- Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai sesuatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkrit, ataukah ditampilkan

Sedangkan dalam berita dua (atasi krisis pangan dan energi) disini kelompok yang dimarjinalkan adalah kelompok Mafia Migas yang diangkap selalu melakukan gangguan terhadap produksi energi dalam negeri yang dalam hal ini dapat mengganggu kedaulatan energi nasional. Berbeda dengan pemerintah saat ini yang berkomitmen untuk mengatasi masalah energi dan pangan dan ingin mengatur ulang tentang politik pangan dan energi.

2. Objektivasi- Abstraksi

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau actor sosial ditampilkan dengan memberikan petunjuk yang konkrit ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Makna yang diterima khalayak akan berbeda karena dengan membuat abstraksi, peristiwa atau actor yang sebenarnya secara kuantitatif berjumlah kecil dengan abstraksi dikomunikasikan seakan berjumlah banyak.

Khalayak akan mempersepsikan lain antara yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi. Penyebutan dalam bentuk abstraksi ini, menurut Van leeuwen sering kali bukan disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan mengenai informasi yang pasti, tetapi sering kali lebih sebagai strategi wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu.

Berita satu (jangan rebut hak rakyat) : Abstraksi yang terlihat membuat sesuatu kata yang abstrak seperti kata “ berbagai”. Dengan menggunakan strategi kata tersebut khalayak atau pembaca akan akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi

Berita dua (atasi krisis pangan dan energi) : Abstraksi yang terlihat membuat sesuatu kata yang abstrak seperti kata “ *Tidak Mengada – ada* ”. Dengan menggunakan strategi kata tersebut khalayak atau pembaca akan akan mempersepsikan lain antara yang disebut jelas dengan yang dibuat dalam bentuk abstraksi.

3. Nominasi-Kategorisasi

Dalam suatu pemberitaan mengenai actor(seseorang/ kelompok) atau mengenai suatu permasalahan, sering kali terjadi pilihan apakah actor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari actor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori ini sebenarnya tidak penting, karena umumnya tidak akan mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Kategori apa yang ingin ditonjolkan dalam pemberitaan, menurut Van leeuwen, sering kali menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam ideologi dari media yang bersangkutan. Karena kategori ini menunjukkan representasi bahwa suatu tindakan tertentu atau kegiatan tertentu menjadi ciri khas atau atribut yang selalu hadir sesuai dengan kategori yang bersangkutan. Seringkali penambahan kategori ini tidak menambah pengertian atau informasi apa pun. Peneliti harus kritis melihat bagaimana suatu kelompok dimarjinalkan atau dikucilkan dengan memberikan kategori atau label yang buruk.

Berita satu (jangan rebut hak rakyat) : pemberian kategori yang represif dan melanggengkan kekuasaan pada era pemerintahan Orde Baru kekuasaan itu secara tidak langsung berita tersebut mengasosiasikan ke dalam benak khalayak atau masyarakat bahwa kepemimpinan Orde Baru itu identik dengan nepotisme, otoriter dan gemar melanggengkan kekuasaan. Ada unsur menyudutkan dan memberi kesan buruk pada pemimpin Orde Baru.

Berita dua (atasi krisis pangan dan energi) :Pemberian kategori “ *Politisi*” mengindikasikan bahwa kasus mengenai gangguan Mafia Migas ini ada unsur politik didalamnya, terbukti yang menjadi korban adalah seorang politisi. Hal ini menunjukkan bahwa

ada dukungan kebijakan politik yang berpihak kepada Mafia Migas. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2012, maka yang bertanggung jawab ada pemerintahan di era itu. Lebih dalam dari itu masalah ini sarat akan kepentingan politik.

4. Nominasi- Identifikasi

Strategi wacana ini hamper mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Disini ada dua proposisi, dimana proposisi kedua penjelasan atau keterangan dari proposisi pertama. Umumnya dihubungkan dengan kata hubung seperti: yang, di mana. Proposisi kedua ini dalam kalimat posisinya sebetulnya murni sebagai penjelas atau identifikasi atas sesuatu. Wartawan barang kali ingin memberikan penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Akan tetapi, sering kali, dan ini harus dikritisi, pemberian penjelasan ini mensugestikan makna tertentu karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok, atau tindakan tertentu. Ini merupakan strategi wacana dimana satu orang, kelompok, atau tindakan diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima oleh khalayak akan buruk pula.

Berita satu (jangan rebut hak rakyat) : Dengan memberikan anak kalimat tersebut, kelompok Elite itu digambarkan buruk, korupsi dan kolusi maupun nepotisme. Padahal tidak semua kelompok Elite seperti itu. Sebagai kalimat penjelas, ada atau tidak adanya anak kalimat itu sama sekali tidak mempengaruhi arti kalimat.

Berita dua (atasi krisis pangan dan energi) : Anak kalimat “*yang mengancam kedaulatan dan kemandirian bangsa*” adalah identifikasi yang diberikan oleh Wartawan. Akan tetapi identifikasi seperti ini sering kali bisa menjadi penilaian ke arah mana peristiwa tersebut harus dijelaskan. Dengan memberikan anak kalimat tersebut menunjukkan bahwa ancaman dan

